

**PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
PADA MASA ORDE BARU (STUDI HISTORIS PEMILU 1977
DI INDONESIA)**

SKRIPSI



Oleh:

RUCHIL FARCHANDYTA AQIDAH

NIM : A02216044

**SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Ruchil Farchandyta Aqidah

NIM : A02216044

Jurusan : Sejarah Peradaban Islam (SPI)

Fakultas : Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika ternyata dikemudian hari skripsi ini terbukti bukan hasil karya sendiri, saya bersedia mendapatkan sanksi berupa **pembatalan gelar kesarjanaan yang saya peroleh.**

Surabaya, 12 Desember 2019

Saya yang menyatakan



Ruchil Farchandyta A

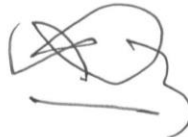
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal, 10 Desember 2019

Oleh

Pembimbing



Drs. H. Abd. Aziz Medan, M.Ag.

NIP: 195509041985031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

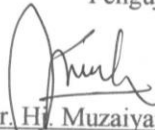
Skripsi ini telah diuji oleh penguji dan dinyatakan lulus
Pada tanggal 27 Desember 2019

Ketua/Pembimbing



Drs. H. Abd. Aziz Medani, M. Ag.
NIP. 195509041985031001

Penguji I



Dr. H. Muzaiyana, M. Fil. I.
NIP. 197408121998032003

Penguji II



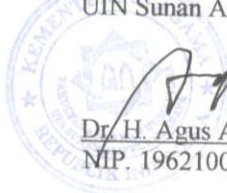
Muhammad Khodafi, S.Sos, M.Si.
NIP. 197211229200031001

Sekretaris



Suhandoko, M. Pd.
NIP. 198905282018011002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Agus Aditoni, M. Ag.
NIP. 196210021992031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
 E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ruchil Farchandyta Aqidah
 NIM : A02216044
 Fakultas/Jurusan : Adab dan Humaniora/Sejarah Peradaban Islam
 E-mail address : aqidahruchil@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
 yang berjudul :

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Masa Orde Baru

(Studi Historis Pemilu 1977 di Indonesia)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2019

Penulis

()
 Ruchil Farchandyta
 nama terang dan tanda tangan

ABSTRACT

The thesis entitled “ Partai Persatuan Pembangunan (PPP) in the New Orde Period (A Historical Study of 1977 Elections in Indonesia) focused on (1) How has the history of PPP been formed? (2) How was the PPP during the New Orde? (3) What was the electability of PPP in the 1977 election?

This study emplaced literature review with an institutional history approach. The theory used as a tool in this study is the theory of Ibn Khaldun's political history of power. During the New Orde era, Indonesian government was absolute and authoritarian. In terms of democracy, the authorities did not hesitate to issue a political party law to secure position in parliament in order that Golongan Karya (Golkar) ridden by the new orde could win throughout the history of the New Orde Election. However, in the 1977 elections, the PPP was precisely able to defeat Golkar locally by winning in DKI Jakarta and Aceh. Provinces then how PPP as political party during the New Orde experienced a collapse of votes at the national level, while at the local level (DKI Jakarta and Aceh) PPP outreached other parties.

From the literature review research that has been studied, the problems presented have the following answers. PPP was formed as a result of the fusion of Islamic political parties during the Old Orde. Established on January 5, 1973, the dynamics of PPP since its establishment up to the 1977 election was troubled by the New Orde Political system which was detrimental to the political parties namely depoliticization policies. Although the space for political parties is limited by the political party law PPP is superior at the local level in the 1977 elections, partly because of PPP's strategy during the election.

Keywords: PPP, New Orde, 1977's Election.

[illegible]

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi dimana rakyat diakui sebagai pemegang otoritas tertinggi. Menurut H. Harris Soche, demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan rakyat. Yang berarti rakyat merupakan pemegang kekuasaan dalam pemerintahan. Selaras dengan H. Harris Soche, John L. Esposito beragumen demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Menyimpulkan dari berbagai argumen para pakarnya, dapat dikatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai negara demokrasi, Indonesia tidak bisa lepas dari penyelenggaraan pemilu. Keterlibatan rakyat dalam sistem pemerintahan sangat vital dalam hal ini. Meskipun secara global, pemilu bukan hanya satu-satunya instrumen demokrasi, namun pemilu tetaplah instrumen utama demokrasi.

Dalam perkembangan sejarahnya, Indonesia terus mencoba menemukan format ideal dari sebuah sistem politik. Berbagai macam perombakan-perombakan yang terjadi dalam sistem pemerintahan Indonesia belum juga menjadikan sistem politik di Indonesia sesuai dengan yang dicitakan bangsa. Dinamika sistem pemerintahan tersebut, tentunya tidaklah lepas dari tangan penguasanya. Seperti halnya Orde Baru bentukan Soeharto yang dianggap sebagai rekonstruksi dari Orde Lama.

PKI atau Partai Komunis Indonesia sebagai partai politik yang berkembang pada masa Orde Lama memiliki ruang gerak yang cukup luas dalam ruang lingkup pemerintahan. PKI semakin aktif melakukan rapat-rapat partai, pembentukan Organisasi-organisasi pemuda, Kaderisasi hingga PKI mampu menjadi Partai terbesar pada waktu itu. Selain itu, PKI mengalami kemajuan pesat tak lain karena dari dukungan penuh Soekarno. Kehidupan memang bagai roda berputar. Setelah mengalami masa

² Muhadam Labolo & Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015), 96.

³ Poerwantana, *Partai Politik di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 74.

PPP merupakan partai Islam pada masa Orde baru yang terbentuk pada 5 Januari 1973. Lahirnya PPP membawa perubahan terhadap dunia perpolitikan di Indonesia. Jika sebelumnya pada masa Orde Lama Masyumi dikenal sebagai politik Islam yang berlandaskan ideologi Islam, maka Orde Baru PPP terlahir dari hasil fusi partai-partai politik Islam pada masa Orde Lama. Dengan dalih “stabilitas politik”, Soeharto melakukan fusi partai politik untuk melanggengkan kekuasaannya hingga hanya ada 3 partai (Golkar, PPP, dan PDI). Pemilu 1977, bisa dibilang merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh partai-partai hasil fusi partai politik, dimana Golkar selalu diunggulkan pada masa Orde Baru ini. Dari pengerdilan itu, Soeharto berhasil menyetir PPP dan PDI melalui Direktorat Sospol di TNI AD dan Kementrian dalam negeri.

Masyumi dikenal sebagai politik Islam yang berlandaskan ideologi Islam, maka Orde Baru PPP terlahir dari hasil fusi partai-partai politik Islam pada masa Orde Lama. Dengan dalih “stabilitas politik”, Soeharto melakukan fusi partai politik untuk melanggengkan kekuasaannya hingga hasil fusi partai (Golkar, PPP, dan PDI). Pemilu 1977, bisa dibilang merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh partai-partai hasil fusi partai politik dimana Golkar selalu diunggulkan pada masa Orde Baru. Setelah pengerdilan itu, Soeharto berhasil menyetir PPP dan PDI. Soeharto menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Direktorat Sospol di TNI AD dan Kementrian dalam negeri.

Dengan begitu, Orde Baru hanyalah legitimasi Soeharto.

partai politik terutama PPP dimasa ini mau tidak mau harus ter

Masyumi dikenal sebagai politik Islam yang berlandaskan ideologi Islam, maka Orde Baru PPP terlahir dari hasil fusi partai-partai politik Islam pada masa Orde Lama. Dengan dalih “stabilitas politik”, Soeharto melakukan fusi partai politik untuk melanggengkan kekuasaannya hingga hasil fusi partai (Golkar, PPP, dan PDI). Pemilu 1977, bisa dibilang merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh partai-partai hasil fusi partai politik dimana Golkar selalu diunggulkan pada masa Orde Baru. Setelah pengerdilan itu, Soeharto berhasil menyetir PPP dan PDI. Soeharto menjabat sebagai Direktur Sospol di TNI AD dan Kementrian dalam negeri.

Dengan begitu, Orde Baru hanyalah legitimasi Soeharto.

partai politik terutama PPP dimasa ini mau tidak mau harus ter

Naik turunnya PPP dalam kancah perpolitikan, menjadikan PPP tetap menjaga keeksistensiannya. Meskipun sepanjang pemilu yakni pada tahun 1971, 1977, 1982 dan 1997 hampir seluruhnya dimenangkan oleh Golkar, namun ditahun 1977 PPP sempat memenangkan suara di Jakarta dan Aceh. (Merdeka, 1977). Di tahun yang sama itulah, PPP banyak mendapatkan intimidasi. Dari sinilah ketertarikan penulis untuk mengkajinya. Suatu apresiasi PPP bisa memenangkan suara dalam pemilu pada masa Orde Baru meskipun secara nasional tetaplah Golkar yang berjaya. Kemenangan PPP dalam pemilu 1977 di tingkat lokal tentu tidaklah lepas dari kampanye yang dilakukan oleh tokoh-tokoh berpengaruh seperti Nurcholis Majid.

⁷ Abdul Aziz, *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP menjadi Partai Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006) , 5.

Untuk kedepannya, penulisan ini diharapkan bisa dijadikan rujukan untuk penelitian dan tulisan setelahnya. Dan yang lebih utama bisa bermanfaat bagi khalayak umum khususnya untuk meningkatkan semangat berdemokrasi yang baik.

Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai politik yang berdiri pada 5 Januari 1973. Partai politik adalah perkumpulan atau segolongan orang-orang yang seasas, sehaluan, setujuan (terutama dibidang politik), baik berdasarkan partai kader atau struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai terkemuka maupun yang berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengatasnamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Awal abad XX, perkembangan Partai Politik diawali dengan organisasi yang mencantumkan asas dan tujuannya dalam kartu anggota seperti Budi Utomo (1908), Indische Partij (1898).⁸

Sistem pemilu di Indonesia dilaksanakan secara reguler dan dilaksanakan dengan seksama. Pembiayaan dengan jumlah besar dialokasikan untuk memobilisasi pemilih dan melakukan polling.⁹ Adapun Pemilu di Indonesia sudah beberapa kali diselenggarakan yakni dari tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

2009, 2014, dan 2019.

2. Kerangka Teoritik

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan sejarah Institusional. Pendekatan sejarah Institusional efektif dalam penelitian ini karena mencakup perangkat (lembaga, struktur, institusi), baik negara (kabinet, birokrasi, parlemen, nirlaba) dan non negara (Ormas, Orsospol, LSM) serta partai (Kuntowijoyo, 2009).

2009, 2014, dan 2019.

2. Kerangka Teoritik

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan sejarah Institusional. Pendekatan sejarah Institusional efektif dalam penelitian ini karena mencakup perangkat (lembaga, struktur, institusi), baik negara (kabinet, birokrasi, parlemen, nirlaba) dan non negara (Ormas, Orsospol, LSM) serta partai (Kuntowijoyo, 2009).

¹⁰ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), 178.

Mengenai kekuasaan, Ibn Khaldun tidak lepas dari istilah *Al-Mulk* yang tercantum dalam karyanya *Muqaddimah*. Istilah *Al-Mulk* merupakan interpretasi Ibn Khaldun tentang kondisi sosial politik di negara-negara Arab-Islam yang senantiasa dililit konflik antar kekuasaan. Menurut Ibn Khaldun, kedudukan menyenangkan meliputi berbagai macam kesenangan materi maupun maknawi, material maupun spiritual, *visible* maupun *invisible* sehingga untuk memperolehnya seringkali melalui kompetisi-kompetisi menggemparkan dan sedikit orang mau menyerahkannya dapat diartikan sebagai kekuasaan. Termasuk partai menjadi proses awal bagi justifikasi kekuasaan, maka seringkali menjadi proteksi, pembela bahkan klaim untuk segala persoalan itu. Untuk memperoleh kekuasaan tidak pernah lepas dari sikap arogan yang mana pemegang kebijaksanaan dari partai atau kelompok yang berkuasa mencari legitimasi kemenangan dari massa dengan berbagai macam siasat dengan mengatasnamakan kelompok, profesi, bahkan agama.¹²

[illegible]

¹² Ibn Khaldun, *Mukaddimah (Terj.)* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 7.

Penulisan skripsi yang berjudul *Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Masa Orde Baru (Studi Histori Pemilu 1977 di Indonesia)* merupakan penulisan sejarah yang bertema politik. Adapun penelitian sebelumnya sebagai berikut.

- [illegible]

1. Heuristik

Berasal dari bahasa Yunani *heuristiken* yang berarti menemukan atau mengumpulkan sumber. Dalam kaitan dengan sejarah yang dimaksud sumber yaitu sumber sejarah yang tersebar berupa catatan, kesaksian, dan fakta-fakta lain yang dapat memberikan penggambaran tentang sebuah peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia. Sumber-sumber sejarah itu sendiri diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yakni: Sumber kebendaan atau material (*material sources*), Sumber non-kebendaan atau immaterial (*immaterial sources*), dan sumber lisan. Dalam metode heuristik ini, penulis menggunakan salah satu teknik dalam metode tersebut yakni kepustakaan. Teknik ini merupakan studi mengenai sumber-sumber tertulis berupa naskah, buku, serta jurnal yang diterbitkan.

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber yang dianggap masuk dalam kategori sumber paling kredibel. Sumber primer bisa berupa kronik, autobiografi, memoir, manuskrip, dan surat kabar.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan UU tentang partai politik yakni UU No. 3 tahun 1975 dan UU No.5 tahun 1985 serta web resmi KPU untuk melihat prosentase pemilu 1977 sebagai sumber primer.

¹⁴ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012) 72.

b. Sumber Sekunder

Dalam penulisan sejarah ini, penulis menggunakan buku-buku kepustakaan yang membahas tentang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan jurnal-jurnal tentang Partai tersebut.

Berikut sumber sekunder atau sumber pendukung dalam penelitian ini:

- 1) *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP menjadi Partai Islam* karya Abdul Aziz;
- 2) *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik* karya Kuswanto;
- 3) *Islam dan Politik Era Orde Baru* karya M. Din Syamsuddin;
- 4) *Kekuasaan Otoriter: Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni* karya Eriyanto;
- 5) Surat kabar terbitan 1977; dan lain-lain

2. Kritik Sumber

Setelah sumber-sumber tersebut terkumpul, langkah selanjutnya diverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik, baik yang bersifat intern (kelayakan atau kredibilitas sumber) maupun ekstern (keabsahan dan autentisitas sumber).¹⁵

¹⁵ M. Dien Madjid & Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah: Sebuah pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014), 224.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 bab, yakni:

Bab I, Pendahuluan. Yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang berkaitan dengan *Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada masa Orde Baru (Studi Historis pemilu 1977)*.

BAB II, berisi sejarah Partai Persatuan Pembangunan. Yang terdiri dari lahirnya orde baru, latar belakang fusi partai politik hingga terbentuknya PPP.

BAB III, berisikan dinamika PPP pada masa Orde Baru dan strategi PPP menjelang pemilu 1977.

BAB IV, berisikan inti dari pembahasan. Di bab ini akan dipaparkan hasil dari pemilu 1977 serta intimidasi dan kecurangan yang didapatkan PPP dalam pemilu tersebut.

BAB V, Penutup yang berisikan kesimpulan serta kritik dan saran atas skripsi ini.

Dalam sejarah Indonesia, Orde Baru dianggap sebagai rekonstruksi Orde Lama. Setelah Soekarno lengser, Soeharto tampil sebagai sosok yang mampu menumpas PKI sampai ke akar-akarnya. Hal itu dilakukan semata-mata ingin mendapatkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintahan. PKI pun dianggap sebagai Partai terlarang sehingga harus dihapus dan dibubarkan. Orde Baru hanyalah legitimasi Soeharto untuk memperkuat kedudukannya dalam pemerintahan Indonesia. Lahirnya supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) menandakan dimulainya rezim Orde Baru.

Situasi dan kondisi Indonesia yang memanas itulah menjadi pendorong mahasiswa turun ke jalan. Melalui AKSI Mahasiswa Indonesia

¹⁹ Achmad Wisnu Aji, *Kudeta Supersemar: Penyerahan atau Perampasan Kekuasaan?* (Jogjakarta: Garasi House of Book, 2017), 9.

Berdasarkan versi lain, lahirnya supersemar terjadi ketika Presiden Soekarno menyelenggarakan sidang Pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan pada 11 Maret 1966. Presiden Soekarno meninggalkan tempat sidang menuju istana Bogor. Akhirnya sidang ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena. Sesampainya di istana Bogor, Dr. Soebandrio (Wakil Perdana Menteri I), Dr. J. Leimena (Wakil perdana Menteri II) dan Chaerul Saleh (Wakil Perdana Menteri III) menyatakan kepada Soekarno bahwa Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan jika diberikan surat tugas atau surat kuasa yang berisi kewenangan kepadanya untuk bertindak. Soekarno setuju dan membuat surat perintah kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap penting guna memperbaiki keamanan dan ketertiban. Surat perintah tersebut sampai pada 12 Maret 1966 di Jakarta.²¹

²⁰ Ibid., 10

[illegible]

Masih di tahun 1966, krisis krisis politik dan ekonomi hasil warisan orde lama dinilai membawa ancaman berbahaya bagi penguasa baru. Menghadapi hal tersebut, Soeharto juga melakukan dua cara untuk mengatasi kendala tersebut. *Pertama*, legitimasi Orde Baru untuk melawan kekuatan Orde lama dimana pengaruh presiden Soekarno masih kuat pada saat itu. *Kedua*, menciptakan strategi melawan para pendukung Orde Lama tanpa peperangan. Dengan dalih “kepuasan materiil” diharapkan mampu memperoleh dukungan rakyat dalam segi perekonomian yang stabil. Strategi yang dilakukan Soeharto dalam bidang perekonomian adalah strategi stabilisasi dan pembangunan ekonomi yang berorientasi keluar, artinya ekonomi Indonesia dimasukkan kembali ke dalam jaringan kapitalis dunia oleh Orde Baru.²⁴

Dalam hal politik, selama perjalanannya tahun 1966-1971, Orde Baru dipimpin oleh Angkatan Darat sebagai inti lembaga

²³ Ramadhan KH. dan G. Dwipayana, *Soeharto: Pikiran, ucapan dan tindakan saya* (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2008), 170.

[illegible]

Dalam hal demokrasi, Orde Baru menempatkan negara sebagai aktor tunggal dan sentral. Hal itu dimaksudkan hanya untuk kepentingan pembangunan dan politik. Dari sinilah pola egaliter dan demokratik terpinggirkan dan digantikan dengan pola feodalistik yang dimungkinkan karena dua hal. *Pertama*, melalui integrasi, pembersihan serta penyatuan birokrasi negara dan militer dibawah satu komando. *Kedua*, melalui upaya penyingkiran politik massa. Anggapan bahwa partisipasi politik yang terlalu luas dan tidak terkendali dapat membahayakan stabilitas politik bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi, maka keterlibatan negara melalui aparat birokrasi dan militer ditetapkan sampai menjangkau ke semua aspek kehidupan masyarakat. Corak demokrasi pada masa Orde Baru adalah sentralisasi peran negara yang diumpamakan melalui Soeharto, MPR, DPR, Pers, Partai Politik, Ormas dan hampir semua lembaga sosial politik kenegaraan yang dibelenggu secara tersusun dibawah kekangan negara oleh Soeharto.²⁶ Adapun perwujudan dari

²⁶ Hartuti Purnaweni, "Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa", *Jurnal Administrasi Publik* vol.3, No. 2, 2004, 121.

Jika pada masa Orde Baru dikenal sebagai fusi partai politik, maka pada masa Orde Lama ada namanya *Partai Gurem*. Partai Gurem adalah partai-partai peserta pemilu yang tidak berhasil meraih kursi atau partai yang tidak jelas power base nya. Partai gurem ini lama kelamaan akan hilang dan partai yang berhasil meraih kursi melakukan penggabungan-penggabungan dalam pembentukan fraksi. Seperti Partai Persatuan Daya yang mendapat satu kursi DPR bergabung dengan Fraksi Partai Katolik, dilain sisi Soejono Prawirosoedarso bergabung dengan Fraksi Nasional Progresif bersama Partai Murba, Baperki, dan lain-lain.²⁸

Kebijakan Soeharto tentang fusi Parpol menjadikan tolak ukur terbentuknya PPP. Partai yang dibentuk pada 5 Januari 1973 dari gabungan partai-partai politik Islam pada masa Orde Lama ini mampu

²⁸ Poerwantana, 60

Berdirinya PPP tidak lepas dari sumbangsi lima deklarator berikut.

ardjaja; Ketua Umum PSII, H. Anwar T
TI, H. Rusli Halil; dan Ketua kelompok

Lima deklaratör itulah yang menandatangani pendirian PPP. Mereka adalah ulama-ulama dan sekaligus politikus muslim yang masyhur memiliki integritas dan moral politik yang tinggi. Pengabdian mereka lebih condong kepada kepentingan bangsa dan agama, bukan kepada kepentingan kelompok. Dengan begitu kekhawatiran akan memicu konflik internal dan membawa perpecahan di dalam partai

[illegible]

Sebelumnya, tepatnya pada masa Orde Lama atau Demokrasi Terpimpin usaha penyederhanaan partai politik sudah dilakukan. Namun, dalam praktiknya mengalami kegagalan. Pasca dikeluarkannya dekrit presiden pada 5 Juli 1959, partai politik mengalami kemunduran dimana kebebasan partai-partai politik dikekang. Hingga pada tanggal 31 Desember 1959, Soekarno mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai politik yang diperkuat dalam Penpres No.7 Tahun 1959 mengenai syarat dan penyederhanaan partai. Beberapa partai politik dibubarkan pada tahun 1960 oleh Presiden Soekarno dengan dukungan Angkatan Darat. Seperti Masyumi yang dibubarkan dengan dalih beberapa pemimpin masyumi ikut andil dengan cara mendukung pemberontakan revolusioner 1960 di Sumatera melawan pemerintah pusat.³¹

dalam praktiknya mengalami kegagalan. Pasca dikeluarkan pemimpin utama penyederhanaan partai politik badan diumumkan presiden pada 5 Juli 1959, partai politik mengalami kemunduran kebebasan partai-partai politik dikekang. Hingga pada 31 Desember 1959, Soekarno mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai politik yang diperkuat dalam Penpres No.7 Tahun 1959 syarat dan penyederhanaan partai. Beberapa partai politik dihapus pada tahun 1960 oleh Presiden Soekarno dengan dukungan Angkatan Darat. Seperti Masyumi yang dibubarkan dengan dalih pemimpin masyumi ikut andil dengan cara mendukung pemberontakan revolusioner 1960 di Sumatera melawan pemerintah pusat.³¹

³² Lingga Winata, " Nasakom sebagai Ideologi Negara tahun 1959-1965" dalam *e-jurnal Pendidikan Sejarah*, vol. 5 No. 3 Oktober 2017. 731.

Kegagalan upaya penyederhanaan partai politik pada masa demokrasi terpimpin adalah dari prosesnya. Pola dan tatacara penyederhanaan yang tercantum dalam Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 mengenai Pengakuan, Pengawasan, serta Pembubaran Partai Politik (yang kemudian diganti dengan Perpres No. 25 Tahun 1960 undemokratis karena presiden mempunyai kekuasaan penuh dalam penyederhanaan partai politik dan penilaian subjektif. Selain itu, dalam pola dan tatacaranya aspek HAM diabaikan karena tanpa melewati *due process* (proses hukum yang sewajarnya yakni yang adil dan hukum yang menghormati seluruh hak hukum yang dimiliki seseorang), dan dasar hukum yang regulasi, semestinya legilasi.³⁵

³³ Daniel Dhakidae, dkk, *Soekarno Membongkar Sisi-sisi Hidup Sang Fajar* (Jakarta: Kompas Jakarta, 2013), 86.

³⁴ Lingga Winata, 735.

³⁵ Kuswanto, *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik* (Malang: Setara Press, 2016), 148.

³⁶ Muchammad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia: Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), 189.

Adapun berhasilnya Soeharto dalam penyederhanaan politik ini tak lain adalah karena adanya dukungan dari ABRI dan TNI AD untuk dapat menyetir roda pemerintahan. Dengan demikian semua sistem pemerintahan tunduk pada satu kekuasaan, Orde Baru. Lain halnya dengan Orde Lama. Kebijakan penyederhanaan politik yang tidak mampu mencapai integritas bangsa, menjadikan upaya Soekarno tersebut gagal. Hal itu selain karena faktor eksternal, namun juga karena faktor intern dari kepemimpinan Soekarno yang kurang tegas sehingga terjadi *chaos* dimana-mana salah satunya adalah dengan munculnya G 30 S/PKI.

Sama halnya dengan organisasi-organisasi lainnya yang memiliki struktur organisasi untuk menjadikan lembaga lebih terstruktur, begitu pun dengan partai politik. Corak struktur Organisasi PPP mencerminkan menyatunya aspek keagamaan dan modernisasi. Dari aspek

[illegible]

1. Wilayah Partai Persatuan Pembangunan ialah Provinsi. Dibentuk oleh seluruh Dewan pimpinan cabang di wilayah tersebut dan ditetapkan oleh pengurus Harian Dewan pimpinan pusat.
2. Cabang Partai Persatuan Pembangunan ialah Kabupaten/Kota. Dibentuk oleh seluruh pimpinan Anak Cabang di cabang tersebut dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah.
3. Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan ialah Kecamatan. Dibentuk oleh seluruh pimpinan Anak Cabang di cabang tersebut dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang.
4. Ranting Partai Persatuan Pembangunan dibentuk oleh anggota di Ranting tersebut dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang.³⁹

“Presiden Partai Persatuan Pembangunan, Dr. KH. Idcham Chalid; Umum DPP, HMS. Mintaredja, SH.; Sekretaris Jendral, Yahya SH.; Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, KH. Masjkur; Ketua Majelis KH. Bisri Sjamsuri”.⁴⁰

³⁸ Abdul Aziz, 95

⁴⁰ *Ketetapan-ketetapan Muktamar* (Jakarta: DPP Jl. Diponegoro No. 60), 121.

PPP PADA MASA ORDE BARU

Setiap peristiwa tidaklah lepas dari unsur tempat dan waktu.

1. Fase Pertumbuhan (1973-1974).

Sebagai partai yang berasaskan Islam, PPP berusaha menerapkan syari'at Islam dalam segi kehidupan, tak lepas dari faktor demografi Indonesia yang penduduknya adalah mayoritas Islam. Untuk mempertahankan ideologinya, PPP bahkan berani melenceng dari aturan-aturan sistem pemerintahan Orde Baru yang telah digariskan. Seperti penolakan PPP atas rencana penghapusan pelajaran

Kedekatan historis PPP dengan perjuangan politik Masyumi juga nampak dalam fase ini yang mendesakkan formalisasi Islam sehingga kesadaran ideologis mereka bangkit ketika menyaksikan kebijakan-kebijakan politik yang merugikan umat Islam. Ditambah lagi, pada periode ini PPP adalah satu-satunya instrumen politik yang dapat dipakai sebagai alat perjuangan politik Islam.⁴¹ kemunculan Parmusi didalam tubuh PPP bisa dikatakan sebagai rehabilitasi Masyumi dari desakan panitia persiapan Amal Muslimin dengan presiden Soeharto. Dari negosiasi yang panjang akhirnya terbentuklah Parmusi pada 30 Februari 1968. Parmusi inilah yang menjadikan PPP memiliki kedekatan secara historis dengan Masyumi.

- Kelompok tradisional yang meliputi NU dan PERTI
- Kelompok Modernis yang meliputi Partai Muslim Indonesia (Parmusi) dan PSII.

⁴¹ Ibid, 158

2. Fase Perkembangan (1974-1977).

Konflik intern yang terjadi di awal pembentukan PPP terganti dengan kekompakan ketika alarm pemilu 1977 diberitakan. Dalam pemilu 1977, seia sekata PPP terlihat nyata dari suksesnya partai mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) tahun 1975. Isi dari Munas 1975 tersebut adalah mengenai rasio perbandingan jatah pembagian kursi dalam pemilu 1977 yang didasarkan pada hasil nyata perolehan kursi.

Kebijakan *depolitisasi* merupakan salah satu strategi Soeharto untuk mempertahankan kekuasaan rezim Orde Baru. Hal itu tercantum dalam UU No.3 tahun 1975 tentang Papol dan Golkar mengenai asas Tunggal Pancasila. Dalam UU tersebut menyatakan bahwa Golkar tidak termasuk kedalam partai politik melainkan Organisasi. Berikut kutipan UU No.3 tahun 1975 pasal 1: “ (point B) Partai Politik adalah organisasi-organisasi kekuatan sosial politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia; (point C) Golongan Karya adaah organisasi kekuatan sosial politik yang bernama Golongan Karya”.⁴² Hal itu dimaksudkan tak lain agar Golkar tidak terkena UU partai politik.

[illegible]

Ciri khas sistem politik era Orde Baru adalah konsep massa mengambang atau *Floating Mass*. Menurut Maswadi Rauf yang sependapat dengan Rudini menyatakan bahwa kebijakan politik rezim Orde Baru merupakan upaya deparpolisasi dan pembentukan massa mengambang atau *Floating Mass*. Akibat dari diterapkannya sistem mengambang ini adalah fungsi dan peranan partai politik melemah. Partai politik tidak diperbolehkan membentuk kepengurusan dikecamatan dan desa. Dengan begitu partai politik tidak dapat melakukan kegiatan politik dipedesaan. Sebaliknya, Golkar diberikan perlakuan yang berbeda dengan partai politik lainnya (PPP dan PDI). Golkar bisa memasuki birokrasi pedesaan dengan begitu Golkar dengan leluasa menampilkan fungsi dan peranan yang dominan di pedesaan maupun kecamatan.⁴³ Adapun tujuan deparpolisasi adalah mengurangi pengaruh partai politik dalam masyarakat dengan cara merusak citra partai politik, mempersulit keanggotaan partai, mengucilkan dan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada warga masyarakat yang menjadi anggota partai politik.⁴⁴ Menurut Mayjen Isman, anggota Dewan Pembina DPP Golkar menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sistem *Floating Mass* sebab akan

⁴⁴ Kuswanto, 150 .

Dengan diterapkannya sistem mengambang atau *floating mass*, PPP semakin sulit mengepakkan sayapnya dalam berbagai ranah masyarakat. Selain itu, hubungan yang sudah terjalin antara PPP dan PDI dengan pendukungnya dipedesaan menjadi terputus. Adanya pembatasan partai politik di ranah pedesaan mengakibatkan kelangsungan hubungan dengan massa menjadi terhalang. Selain itu, akibat dari pembatasan kegiatan partai politik adalah kemandulan kaderisasi dalam partai politik karena rakyat terutama di pedesaan yang notabene banyak masyarakat yang bermukim dibebaskan dari kegiatan-kegiatan politik, yaitu dengan terputusnya hubungan mereka dengan partai politik. PPP, sebagai partai politik baru, tentunya merasakan dampak dari sistem politik ini. Terutama dalam pemilu pertamanya yakni tahun 1977. PPP dan PDI dirugikan dalam hal ini, namun tidak dengan Golkar. Sistem mengambang ini merupakan salah satu strategi Soeharto agar Golkar tetap eksis dikalangan masyarakat.

Menurut KBBI, strategi diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. PPP sebagai partai politik memiliki strategi tersendiri untuk bisa bersaing dalam pemilu 1977. Mengutip dari surat kabar *Tempo*:

[illegible]

Adapun kampanye 1977 dinyatakan terbuka secara menyeluruh bagi wilayah Indonesia untuk para peserta pemilu. Tentang logo gambar peserta pemilu dilarang tegas menyerupai lambang negara Republik Indonesia.⁴⁷ Dalam Kampanye pemilu 1977 bisa dikatakan lebih santai dibanding pemilu 1971. Menurut pendapat dari bekas tokoh PNI, Manai Sophiaan menyatakan bahwa penekanan terhadap partai politik ditahun 1977 lebih keras dibanding tahun 1971. Melihat massa PPP yang begitu banyak , menjadikan Golkar khawatir dibandingkan pemilu tahun sebelumnya (1977). Tak mau kalah dari PPP dan Golkar, PDI memiliki cara tersendiri untuk menggaet massa.

massa PPP yang begitu banyak, menjadikan Golkar dibandingkan pemilu tahun sebelumnya (1977). Tak mau PPP dan Golkar, PDI memiliki cara tersendiri untuk menggagalkan PPP, Golkar, PDI dengan gencar melakukan kampanye mendapatkan kedudukan dikursi pemerintahan. Diberitakan Tempo, Golkar memulai terlebih dahulu kampanyenya

⁴⁷ Moch. Eshza Akbarsyah & Pradipta Niwandhono, “ Aktivitas Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Cabang Kota Surabaya dalam Pemilihan Umum Tahun 1977-1987” dalam *Verleden: Jurnal Kesenjarahan*, Vol. 4 No. 2, Juni 2014, 138.

Berikut kampanye dari ketiga partai tersebut.

Sebagai partai yang mendeklarasikan dirinya sebagai partai Politik Islam, PPP mengusung tema keagamaan dalam kampanye pemilu 1977. Selain berkampanye, PPP juga bersilaturchami dengan massa pelajar dan mahasiswa luar Jawa yang berasal dari Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Sunda, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Maluku dan NTB. Pada hari Minggu, 20 Maret, partai berlambang ka'bah ini menyelenggarakan pawai dengan kurang lebih 4.000 sepeda motor. Dan pada Rabu, 23 Maret 1977, PPP menyelenggarakan pertemuan tertutup di markasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta bersama dema perguruan tinggi Islam Jakarta. Diantaranya dari universitas Muhammadiyah, Ibn Chaldun, Asysyafiiyah, Aththahiriyah dan

[illegible]

PPP juga turut menghadirkan tokoh-tokoh berkharismatik untuk orasi dihadapan publik. Nurcholis Madjid merupakan salah satu juru kampanye PPP dalam pemilu 1977. Pada 10 April 1977, Cak Nur berkampanye di Tambaksari, Surabaya dihadapan kurang lebih 75.000 massa PPP, ia menyinggung masalah pembangunan yang mengalami kemajuan dan berjalan tetapi keadilan sosial bagi rakyat pampat. Sepanjang kampanye, Nurcholis meneriakkan 'hidup Kakbah!'.⁵¹ Cak Nur juga dengan berani melakukan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru dalam orasinya dia mengatakan bahwa penguasa Orde Baru tampak lemah, dan tak tahan godaan kekuasaan. Sehingga dimana-mana terjadi gejala dan kasus penyelewengan kekuasaan. Nurchlis Madjid juga menyelenggarakan kuliah umum di IAIN "Sunan Ampel Surabaya". Nurcholis menyatakan bahwa dia bukan orang PPP juga bukan anggota DPR. Namun, Nurcholis kampanye atas nama PPP karena partai ini masih memiliki keberanian moril mengemukakan argumen sedang PPP dalam posisi yang lemah.

⁵¹ Merdeka, PPP Keberatan Hasil Pembangunan Dinikmati Hanya Oleh Golongan Tertentu, 14 April 1977, VII

Selain di Surabaya, PPP juga gencar melakukan kampanye di Jakarta. PPP menggelar kampanye akbar di parkir Timur Senayan, Jakarta dengan dihadiri ratusan ribu massa. Kampanye juga dimeriahkan oleh raja dangdut RHOMA Irama untuk menarik perhatian massa.⁵³ Di Bogor Barat, berdasarkan koran Merdeka, merupakan kampanye terbesar PPP dengan seluas 8000 meter persegi dipadati oleh massa kakbah.

Adapun di Lapangan Ngebon, Kecamatan Tempel terdapat Haji Syaiful Mujab sebagai juru kampanye PPP. Massa bersepeda motor keliling halaman kodim untuk melakukan pawai. Tak ketinggalan dua juru Kampanye PPP yakni KH. Hasyim Adnan dan Chalid Mawardi ber-orasi untuk PPP di Kramat Jati dan Taman Amir Hamzah. Meskipun pada akhirnya kampanye Hasyim Adnan di stop di Karawang saja.⁵⁴

PDI (Partai Demokrasi Indonesia) dalam kampanye 1977 mengusung tema “Mengamalkan Pancasila Melalui Pembangunan Nasional” dimana PDI sebagai sarana penegak Demokrasi Pancasila, Pemersatu rakyat, dan sarana perjuangan rakyat.

⁵⁴ Tempo, *Percikan-Percikan Persaingan*, 9 April 1977, 6.

Selain itu, dilihat dari perkiraan kemenangan PPP kebanyakan pendukungnya adalah mereka yang murni mendukung partai-partai Islam maka PPP akan condong menjadi partai Islam. Dengan begitu, hubungan massa PPP tetap terjaga meskipun secara asional dalam berbagai masalah PPP tidak menutup kemungkinan tersisih dalam menghadapi Golkar dan PDI.⁶²

⁶² Ibid. 8.

ELEKTABILITAS PPP DALAM PEMILU 1977

Pemilu pertama pada masa Orde Baru di Indonesia diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1971. Pemilu ini diikuti 9 Partai politik yakni PKRI, PSII, NU, PARMUSI, PARKINDO, MURBA, PNI, PERTI, IPKI, dan Golkar. Jumlah keseluruhan partai politik yang ikut dalam pemilu 1971 sebanyak 10 partai politik, 9 partai politik dan 1 Golongan Karya.

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa hasil pemilihan Umum tahun 1971 dapat dibentuk 4 fraksi yang terdiri atas dua fraksi partai politik (PPP dan PDI), satu fraksi Golongan Karya dan fraksi ABRI. PPP merupakan hasil fusi dari partai-partai NU, MI, PSII dan PERTI sedangkan PDI hasil fusi dari partai-partai PNI, IPKI, MURBA, PARKINDO dan partai Katolik.

[illegible]

Pemilu tahun 1977 diselenggarakan tepatnya pada 2 Mei diikuti oleh tiga partai politik yakni PPP, Golkar dan PDI. Pemilu diselenggarakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, presiden Soeharto beserta keluarga turut memberikan suaranya di Jalan Cendana 31.⁶⁴

⁶⁴ Nazaryddun Siamsuddin, *Jejak Langkah Pak Harto* (Jakarta: Citra Kharisma Bunda, 2003), 488.

Sama halnya pemilu 1971, pemilu 1977 juga menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar.⁶⁷ Yang dimaksud perwakilan berimbang adalah partai akan menentukan daftar calon. Badan penyelenggara pemilu 1977 memiliki struktur yaitu PPI ditingkat pusat, PPD I di provinsi, PPD II di kabupaten/Kotamadya, PPS di kecamatan, Pantarlih di desa/kelurahan, dan KPPS.⁶⁸

Pemilu 1977 bukanlah pemilu pertama yang diselenggarakan pada masa Orde Baru. Sebelumnya, tepatnya pada 5 Juli 1971 pernah diselenggarakan pemilu yang merupakan pemilu pertama pada masa

⁶⁸ Ibid., 7

Soeharto ketika partai politik belum melakukan fusi. Seperti yang dipaparkan di bab sebelumnya, peserta dalam pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik hasil dari pengkerdilan pada masa Orde Lama. Adapun dari kalangan agamis meliputi partai NU, Parmusi, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti. Sedangkan kalangan nasionalis terdapat PNI, IPKI, dan Murba. Berikut hasil dari pemilu 1971.

No.	Nama Partai	Suara	Suara (%)	Kursi
1.	Golkar	34.348.673	62,82	236
2.	NU	10.213.650	18,68	58
3.	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4.	PNI	3.793.266	6,93	20
5.	PSII	1.308.237	2,39	10
6.	Parkindo	733.359	1,34	7
7.	Partai Katolik	603.740	1,10	3
8.	Perti	381.309	0,69	2
9.	IPKI	338.403	0,61	
10.	Murba	48.126	0,08	
	Jumlah	54.669.509	100,00	360

Tabel 4.1 hasil pemilu 1971⁶⁹

Dari hasil pemilu 1971 didapatkan perolehan jumlah anggota DPR terpilih dalam pemilu ini sebanyak 460 orang yang terdiri dari 360 orang dipilih dan 100 orang diangkat dengan 75 orang dari ABRI dan 25 orang non-ABRI.⁷⁰ Adapun perolehan kursi dari kalangan agamis yang berbasis Islam (yang nantinya berfusi ke dalam PPP) yakni NU, Parmusi, PSII dan Perti berhasil memperoleh kursi dalam parlemen (terutama NU) yang menempati kedudukan kedua setelah Golkar. NU berhasil memperoleh

⁶⁹ www.kpu.go.id, diakses pada 12 November 2019 pukul. 17.08.

⁷⁰ Ibid.,

Dominasi partai Islam, khususnya NU, menjadikan Soeharto khawatir kedudukannya tergoyahkan karena tidak menutup kemungkinan Golkar kalah di pemilu selanjutnya. Kemenangan Golkar dalam pemilu 1971 ini bagi Soeharto harus tetap dipertahankan dalam setiap pemilihan umum. Oleh karena itu, Soeharto mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan *Hegemonic Party System* dimana partai politik mendominasi proses politik lainnya. Walaupun ada partai politik lain, maka partai politik tersebut dijadikan sebagai partai politik pelengkap. Dengan penyederhanaan politik tersebut, Soeharto telah menggabungkan 2 parpol hasil fusi yakni PPP dan PDI.

Dari pemilu yang diselenggarakan pada 2 Mei 1977, diperoleh penghitungan suara sementara oleh LPU pada 3 Mei 1977 dini hari.

14	Kalimantan Barat	141,678	383,074	36,807	561.559	1,072,981
15	Kalimantan Tengah	74,040	179,159	9,120	262,319	426,586
16	Kalimantan Selatan	319,169	314,887	6,061	638,117	978,958
17	Kalimantan Timur	66,719	95,662	11,669	174,050	533,133
18	Sulawesi Utara	43,980	414,620	59,944	518,544	933,420
19	Sulawesi Tengah	66,122	25,526	3,583	321,231	571,959
20	Sulawesi Tenggara	12,826	389,631	3,172	405,629	409,601
21	Sulawesi Selatan	387,774	2,343,610	22,521	2,753,905	2,914,368
22	Bali	19,375	1,008,139	154,666	1,182,180	1,304,724
23	Nusa Tenggara Barat	314,209	517,520	46,973	878,702	1,299,157
24	Nusa Tenggara Timur	21,474	958,763	85,248	1,065,485	1,349,574
25	Maluku	70,483	229,834	44,692	345,009	643,054
26	Irian Jaya	10,505	95,335	17,336	123,176	552,148
27	Luar Negeri	336	2,049	252	2,637	42,799
Jumlah Suara		12,687,865 (28,84%)	28,171,152 (64,03%)	3,136,413 (7,13%)	43,995,430	70,662,155

Tabel 4.2 hasil sementara penghitungan suara tingkat lokal⁷¹⁷¹ Merdeka, *PPP unggul di Wilayah DKI Jakarta*, 4 Mei 1977.

Provinsi	PPP	Golkar	PDI
Aceh	57, 3	41, 2	1, 5
Sumatera Utara	22, 2	66, 4	11, 3
Sumatera Barat	32, 4	66, 5	1, 0
Riau	33, 9	63, 3	2, 7
Sumatera Selatan	42,6	49, 8	7, 5
Jambi	15, 7	83, 5	0, 8
Bengkulu	21, 8	76, 5	1, 7
Lampung	30, 8	61, 8	7, 4

[illegible]

Jawa Barat	28, 5	66, 3	5, 2
Jakarta	43, 5	39, 3	17, 3
Jawa Tengah	28, 3	52, 6	19, 1
Yogyakarta	23, 2	56, 6	20, 2
Jawa Timur	36, 0	58, 8	5, 1
Kalimantan Barat	21, 8	68, 9	9,3
Kalimantan Tengah	26, 6	69, 8	3, 5
Kalimantan Selatan	49, 4	49, 6	1, 0
Kalimantan Timur	35, 4	57, 0	7, 6
Sulawesi Utara	17, 6	72, 8	9, 5
Sulawesi Tengah	19, 3	79, 3	1, 4
Sulawesi Tenggara	3, 1	96, 1	0, 8
Sulawesi Selatan	14, 0	85, 2	0, 8
Bali	1, 6	85, 4	13, 0
Nusa Tenggara Barat	36, 6	57, 5	5, 9
Nusa Tenggara Timur	1, 9	90, 3	7, 8
Maluku	19, 0	71, 8	9, 1

Tabel 4. 3 Perolehan suara pemilu 1977 tingkat provinsi⁷³

Walaupun di kota-kota besar suara Golkar cenderung rendah, namun Golkar tetap unggul secara nasional. Seperti dalam pemilu 1971, Golkar mencapai 62,8% suara sedangkan ditahun 1977 Golkar mengalami sedikit penurunan sekitar 0,5% dengan perolehan suara 62,14%.⁷⁴ Berikut prosentase perolehan kursi anggota DPR dalam pemilu 1977.⁷⁵

No.	Nama	Suara	Suara (%)	Kursi
1.	Golkar	39.750.096	62,11	232
2.	PPP	18.743.491	29,29	99
3	PDI	5.504.757	8,60	29
JUMLAH		63.998.344	100,00	360

Tabel.4. 4 Perolehan Kursi DPR 1977

⁷³ R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru*, 49.⁷⁴ *Tempo, Dan Para Golkar pun Menjawab*, 28 Mei 1977, 5.⁷⁵ www.kpu.go.id, diakses pada 12 November 2019 pukul. 17.08.

Tabel.4. 5 Perolehan Kursi DPR dalam pemilu 1982⁷⁶

No.	Nama Partai	Suara pemilu 1977 (%)	Suara pemilu 1982 (%)	Perubahan
1.	PPP	62,11	64, 34	+ 2,23
2.	Golkar	29,29	27,78	-1,51
3.	PDI	8,60	8,60	-

Pada pemilu 1982, PPP mengalami pengurangan dalam kursi parlemen. Namun, mengalami peningkatan dalam hasil suara(%), disisi lain Golkar mengalami penurunan dalam hasil suara (%) dan mengalami peningkatan dalam kursi parlemen. Sedangkan PDI berada dikedudukan yang stagnan dimana dalam perolehan jumlah kursi dalam parlemen

[illegible]

mengalami penurunan daripada pemilu sebelumnya yakni dari 29 menjadi 24.

Data tersebut, menandakan bahwa Partai Persatuan Pembangunan terus mengalami pasang surut terutama pada masa orde baru. Pada tahun 1977 PPP bisa dikatakan sebagai masa keemasannya. Namun, pada pemilu 1982 PPP mengalami kemunduran. Dari 99 kursi yang berhasil diperoleh pada 1977 menjadi 94 kursi pada tahun 1982. Sedangkan Golkar mengalami peningkatan dalam parlemen pada tahun tersebut.

C. Faktor kemenangan PPP pada pemilu 1977

Kemenangan PPP ditingkat lokal terutama di Aceh dan Jakarta terjadi di basis-basis eks Masyumi, dan ada beberapa tokoh Masyumi sering tampil mendukung PPP. Selain itu, ada sejumlah faktor lain yang membuat PPP bisa menggaet suara yang begitu banyak. Figur tokoh tidak dapat dilepaskan dari kejayaan PPP pada masa Orde Baru ini. Orasi dan kuliah umum yang diselenggarakan oleh Nur Cholis Madjid mampu menghipnotis khalayak umum untuk memilih PPP. Dalam pemilu 1977, angkatan muda dan mahasiswa lebih banyak bersimpati pada parpol.⁷⁷ Selain Nur Cholis Majid, masih banyak juru kampanye yang gigih meneriakkan “Ka’bah”. Diantaranya adalah Haji Syaiful Mujab dan Haji Hasyim Adnan.

Adapun tak ketinggalan artis-artis yang fenomenal pada saat itu ikut merayakan kampanye PPP. Seperti Rhoma Irama yang familiar

⁷⁷ *Tempo*, 28 Mei 1977, 6.

Selain dari basis-basis eks Masyumi, pengaruh NU dalam fusi PPP membawa dampak pada *booming* nya PPP dalam masyarakat. Pada pemilu 1977 ini, tidak sedikit warga yang memberikan suara politiknya pada PPP. Hal itu dikarenakan kekompakan dan kegigihan PPP dalam pemilu ini.⁷⁸ Berdasarkan data yang diperoleh, kemenangan PPP kebanyakan dari mereka yang secara tradisional telah menjadi pendukung partai-partai Islam.

membawa dampak pada *booming* nya PPP dalam masyarakat. Pada 1977 ini, tidak sedikit warga yang memberikan suara politiknya pada PPP. Hal itu dikarenakan kekompakan dan kegigihan PPP dalam pemilu. Berdasarkan data yang diperoleh, kemenangan PPP kebanyakan mereka yang secara tradisional telah menjadi pendukung partai Islam.

Kondisi demografi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim juga menjadi salah satu faktor kemenangan PPP. Karena PPP merupakan satu-satunya partai Islam di masa Orde Baru. Kemenangan PPP di Aceh merupakan salah satu akibat dari faktor demografi Aceh yang didominasi dengan masyarakat Islam dan Aceh yang dikenal dengan

membawa dampak pada *booming* nya PPP dalam masyarakat. Pada 1977 ini, tidak sedikit warga yang memberikan suara politiknya pada PPP. Hal itu dikarenakan kekompakan dan kegigihan PPP dalam pemilu. Berdasarkan data yang diperoleh, kemenangan PPP kebanyakan mereka yang secara tradisional telah menjadi pendukung partai Islam.

Kondisi demografi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim juga menjadi salah satu faktor kemenangan PPP. Karena PPP merupakan satu-satunya partai Islam di masa Orde Baru. Kemenangan PPP di Aceh merupakan salah satu akibat dari faktor demografi Aceh yang didominasi dengan masyarakat Islam dan Aceh yang dikenal dengan

menang dengan perolehan suara 45%.⁷⁹ Dari faktor tersebut tidak menutup kemungkinan faktor dari kemenangan PPP dalam pemilu 1977 di Jakarta. Selain itu, DKI Jakarta dinilai paling bebas dan rahasia untuk memilih.⁸⁰

D. Intimidasi dan Kecurangan dalam Pemilu 1977 Versi Media Cetak

Menurut Ibn Khaldun, kekuasaan dapat dicapai dengan dukungan bangsa dan kaumnya. Mereka itulah fanatismenya yang mendukung menggapai tampuk kekuasaan. Ketika mulai tampak kebijakan yang otoriter terhadap mereka dalam menikmati kekuasaan dan meminggirkan mereka untuk ikut menikmati keberhasilan, maka pada hakikatnya mereka menjadi bagian dari musuh-musuhnya.⁸¹

Dalam pemilu 1977, baik parpol maupun Golkar merasa mendapat kecurangan dan bahkan mendapat intimidasi. Sehingga mereka meminta untuk diadakannya pemungutan suara ulang karena dianggap tidak sah. Banyak dari pemungutan suara yang dipalsukan. Menurut pengakuan salah seorang parpol adanya kekerasan, penekanan, yang umumnya dialami oleh PPP dan PDI tidak dilakukan oleh Golkar, melainkan oleh aparat pemerintah dan keamanan. Namun, perlakuan tidak menyenangkan yang dialami PPP dan PDI tidak dialami Golkar.⁸² Argumen tentang perlakuan intimidasi yang tidak dialami Golkar dibantah oleh Cosmas, DPP Golkar saat itu. Di Yogya, misalnya, Golkar diperlakukan dengan keras oleh PPP.

Bahkan Golkar disebut sebagai *Kafir*.

⁷⁹ R. William Liddle, 48.

⁸⁰ Tempo, *PPP Nampak Naik. Lalu Apa?*, 14 Mei 1977.

⁸¹ Ibn Khaldun, 316.

⁸² Tempo, 6

Meskipun terdapat Forum Kontak dan Komunikasi, namun kasus kecurangan dan intimidasi masih terekam oleh media massa. Dalam Tempo, Kamis 9 Juni seusai sidang 2 hari, penghitungan suara untuk pemilihan anggota DPR oleh panitia Pemilihan Indonesia berakhir. Namun, PPP dan PDI masih menuntut adanya tuntutan penghitungan ulang suara di beberapa kabupaten. Setidaknya ada 10 kabupaten di Jawa Timur yang oleh PDI dianggap perlu diadakan pemungutan suara ulang. Tuntutan diadakannya pemungutan suara ulang itu disinyalir kuat oleh PDI terutama

[illegible]

Dalam kasus kecurangan dan intimidasi yang terjadi pada pemilu 1977 ini telah diberitakan dalam beberapa media massa. Setiap media massa menampilkan kecurangan dan intimidasi yang berbeda-beda tergantung sudut pandangnya. Seperti surat kabar suara karya dalam pemberitaan berusaha meningkatkan citra Golkar didepan umat Islam dalam kampanye pemilu 1977, yaitu dengan mengeluarkan berita yang berupaya membedakan antara kegiatan politik dan agama. Lain halnya dengan surat kabar Merdeka, yang pemberitaannya lebih sedikit mengenai Golkar.⁸⁵ Oleh karenanya, Surat kabar merdeka dan Tempo yang akan digunakan dalam analisis kecurangan dan intimidasi terhadap PPP 1977 karena memberitakan lebih banyak mengenai partai politik.

⁸⁵ Marini Agustyna, "Strategi Kampanye Politik Golkar Pada Pemilihan Umum 1977-1987: Dalam Perspektif Pemberitaan di Surat Kabar Suara Karya dan Merdeka" dalam e-Journal Pendidikan Sejarah vol. 4, No. 3 Oktober 2016, 873.

Kecurangan tak berhenti dalam permasalahan formulir CA 1 namun juga mengenai terkorupnya hak pilih. Di Jawa Timur terdapat 1 juta lebih pemilih yang tidak menerima surat panggilan pemilu. Menurut Chalid Mawardi terdapat kurang lebih 1 juta pemilih (sebagian besar warga kakbah) dalam daerah pemilihan tingkat I tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2 Mei 1977 karena mereka tidak mendapat surat panggilan formulir C dari KPPS.⁸⁸

⁸⁶ Merdeka, *Presiden Kirim Surat pada Presiden Soeharto*, 27 April 1977, VIII.

⁸⁸ Merdeka, PPP Akan Sampaikan Kasus Jawa Timur Pada Presiden, 5 Mei 1977, VII

Menuju bulan April tepatnya pada 7 April pengadilan Negeri Sidoarjo memvonis Ny. Aisyah binti M. Thoib dengan kasus melakukan kampanye untuk PPP tanpa izin. Ny. Aisyah dipenjara selama 1 bulan dengan masa percobaan 2 bulan. Melihat tersebut tentunya PPP tidak tinggal diam. Biro Pembela Hukum LPUI-DPP PPP membentuk Korps Sukarelawan Pembela Hukum dengan anggotanya adalah sarjana dan mahasiswa hukum guna membela para terduduh.

Intimidasi dan kecurangan tak berhenti disitu, menjelang minggu tenang, beberapa parpol daerah Banyuwangi(Muncar, Glenmore, Genteng, Jajag, Giri) yang tak lain kebanyakan adalah dari PPP bersiap-siap mengungsi karena mereka takut ditangkap Koramil seperti kejadian pemilu sebelumnya.

Dari dua surat kabar tersebut (Merdeka dan Tempo), keduanya memiliki kualitas pewartaan yang berbeda. Adapun dua kasus besar yang dialami oleh PPP yang terekam dalam pemberitaan surat kabar Merdeka dan Tempo. Yakni mengenai misteri kematian H. Angin Bugis dan Kiai Hasan Bisri.

Kasus H. Angin Bugis merupakan salah satu bentuk kecurangan dan intimidasi terhadap PPP perspektif media cetak Merdeka dan Tempo.

Dalam *Merdeka* edisi 4 Mei 1977, dipaparkan hasil sementara pemilu tingkat lokal dimana PPP unggul di DKI Jakarta dan Aceh. Namun, dihalaman yang sama diberitakan bahwa PPP memasang bendera merah putih dan ka'bah setengah tiang sebagai aksi simbolis atas meninggalnya Haji Angin Bugis, Sekretaris dewan PPP Sumatera Utara yang sebelumnya terlibat tuduhan kasus pemalsuan suara. Sejak 20 April, Angin Bugis ditahan Kejaksaan tinggi Medan. Pada tanggal 4 Mei, tepatnya 3 hari setelah dibebaskan, Angin Bugis menghembuskan nafas terakhirnya.

[illegible]

massa tersebut adalah mengenai misteri meninggalnya Haji Angin dan Kiai Hasan Bisri.

PENUTUP

Dari uraian pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan:

- [illegible]

B. SARAN

Mahasiswa sebagai *Agent of Change* haruslah mampu menerapkan sikap demokratis yang jujur dan adil. Dan sebagai social control, Mahasiswa harus memiliki kepekaan terhadap situasi yang terjadi dilingkungan sekitar. Mahasiswa juga dituntut mengkritik terhadap penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa.

Pendidik haruslah mampu menanamkan sikap demokratis kepada pelajar. Implementasinya yaitu dengan menghormati dan menghargai sesama. Tidak hanya sikap demokratis, namun juga sikap nasionalisme, sikap cinta tanah air perlu ditanamkan sejak kecil.

- Kadir, A. Gau. “Dinamika Partai Politik di Indonesia”, *Jurnal Sosiohumaniora* (2014) Vol. 16 No.2 Juli.
- Purnaweni, Hartuti. “Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa” *Jurnal Administrasi Publik* (2004) vol.3, No. 2.
- Rohmawai, Yuli. “Perubahan Elektabilitas Partai Peserta Pemilu di Yogyakarta Tahun 1971-1999” dalam *e-Jurnal Pendidikan Sejarah* (2016) vol. 4 No.2, Juli.
- Taylor, “ Elections and Politics in Southeast Asia” in the *Politics of Elections in Southeast Asia* (1996). Cambridge: Woodrow Wilson Center Press and Cambridge University Press.
- Winata, Lingga. “ Nasakom sebagai Ideologi Negara tahun 1959-1965” dalam *e-Jurnal Pendidikan Sejarah* (2017). vol. 5 No. 3 Oktober.

Koran:

- Merdeka. *PPP unggul di Wilayah DKI Jakarta*. 4 Mei 1977.
- Merdeka. *PPP Keberatan Hasil Pembangunan Dinikmati Hanya Oleh Golongan Tertentu*. 14 April 1977.
- Tempo. *PDI Bukan Kalah. Tapi Akan Habis?*. 21 Mei 1977.
- Tempo. *Dan Para Golkar pun Menjawab*. 28 Mei 1977.
- Tempo. *Mengundang Sidang Istimewa MPR?*. 4 Juni 1977.
- Tempo. *PPP Nampak Naik. Lalu Apa?*. 14 Mei 1977.
- Tempo. *Ada Kampanye Yang Lucu Ada yang Tak Lucu*. 19 Maret 1977.
- Tempo. *Konsensus 15 Maret: Siapa yang Puas?*. 16 April 1977.
- Tempo. *Percikan-Percikan Persaingan*. 9 April 1977.
- Tempo. *PPP Menang dan Dituduh Curang*. 2 April 1977.
- Tempo. *Setelah Pidato Habis dan Suara Dihitung*. 7 Mei 1977.
- Tempo. *Tenang, Manis, Rukun*. 30 April 1977.

www.kpu.go.id